

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Pujoalwanto (2014:87) Pertumbuhan Ekonomi merupakan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat.

Menurut Sukirno (2016:423) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam Masyarakat bertambah, seperti pertambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Menurut Rapanna dan Zulfikry (2017:6) Pertumbuhan Ekonomi yaitu suatu proses dimana adanya peningkatan pendapatan tanpa ada kaitannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk umumnya sering dikaitkan dengan Pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur menggunakan kenaikan PDRB menurut harga Konstan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merujuk pada perkembangan fisik produksi barang dan jasa di suatu daerah, termasuk peningkatan dalam sektor industri, Pembangunan insfrastruktur, penambahan jumlah sekolah, peluasan sektor jasa dan peningkatan produksi barang modal.

2.1.2.2 Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Pertumbuhan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, sementara PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. (Badan Pusat Statistik, 2023)

Laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perhitungan PDRB atas harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi PDRB pada tahun tertentu terhadap nilai pada tahun sebelumnya dibagi dengan nilai pada tahun sebelumnya dan dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. (Badan Pusat Statistik, 2023)

Berikut ini rumus untuk menghitung tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

$$G = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

G = laju pertumbuhan ekonomi

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun sekarang

$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

Dengan hasil perhitungan dari formula tersebut maka laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diketahui.

2.1.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011:332) ada lima faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat.

2. Organisasi

Pembentukan modal ini pula yang membawa ke arah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa ke arah penghematan dalam produksi skala luas dan juga membawa ke arah penggalan sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi

3. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktivitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

4. Pembagian kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa perekonomian ke arah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Nomor 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:101) bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lainnya yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali penandaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Menurut Mardiasmo (2019:130) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari potensi daerah baik dari rektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan Pembangunan daerah.

2.1.3.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 Nomor 1 tercantum tujuan dari pendapatan asli daerah yaitu untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2.1.3.3 Jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014: 101-104) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

a) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

Adapun jenis pajak pada kabupaten/kota tersusun dari pajak berikut:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- 7) Pajak lingkungan
- 8) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 9) Pajak parkir
- 10) Pajak sarang burung wallet
- 11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran
- 12) BPHTB

b) Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi.

Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

3) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

2.1.3.4 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 8 Nomor 1 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Oleh karena itu, untuk menghitung Pendapatan Asli daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang}$$

2.1.3 Dana Alokasi Umum

2.1.3.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Nomor 21, menjelaskan Dana Alokasi Umum merupakan salah satu tranfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 pasal 1 ayat 23 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan uraian diatas mengenai Dana Alokasi Umum, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk

pembiayaan daerah, dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan daerah untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah. Dimana daerah yang memiliki besaran pendapatan lebih rendah akan mendapatkan dana alokasi umum dengan jumlah yang lebih besar dari pada yang jumlah pendapatan daerahnya lebih tinggi.

2.1.3.2 Tujuan Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi setiap daerahnya. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal yang dimaksudkan adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas daerah, sedangkan yang dimaksudkan dengan dana alokasi dasar yaitu dihitung berdasarkan jumlah Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dana Alokasi Umum memiliki tujuan penting dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik diantara Pemerintah Indonesia. Dikarenakan Indonesia yang merupakan negara kaya akan sumber daya alam tetapi pengalokasian distribusi sumber daya alam diantara provinsi maupun Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia tidak merata. Hal ini yang akan menyebabkan ketidakmerataan sumber dana perimbangan keuangan dari Pemerintah Daerah yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam. Dengan kata lain, bahwa Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk dapat memperbaiki adanya ketimpangan fiskal dalam

pemerataan sumber Dana Perimbangan tersebut yang akan ditimbulkan oleh bagi hasil atas sumber daya alam.

2.1.3.3 Formula Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Formula Dana Alokasi Umum (DAU) menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar berupa jumlah gaji PNS daerah. Berikut rumus dari formula DAU:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Keterangan:

AD : Gaji PNS Daerah

CF : Kebutuhan fiskal – Kapasitas Fiskal

2.1.3.4 Metode Perhitungan Dana Alokasi Umum

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan terdapat dua metode dalam perhitungan Dana Alokasi Umum, diantaranya sebagai berikut:

1. Alokasi Dasar (AD)

Besaran Alokasi Dasar dihitung menurut realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah sebelumnya (t-1) yang mencakup gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan kebutuhan penggajian PNS yang berlaku.

2. Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan alokasi berdasarkan celah fiskal suatu daerah dapat dihitung dengan mengalihkn bobot celah fiskal daerah yang bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF dengn KpF.

2.1.3.5 Perhitungan Dana Alokasi Umum

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) terdapat beberapa ketentuan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum

Ketentuan Perhitungan:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota
2. Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.
3. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/ota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota

Rumus Perhitungan:

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

$$\text{Celah Fiskal} = \text{KbF} - \text{KpF}$$

Kebutuhan Fiskal (KbF)

$$\text{KbF} = \text{TBR} (\alpha_1 \text{IP} + \alpha_2 \text{IW} + \alpha_3 \text{IKK} + \alpha_4 \text{IPM} + \alpha_5 \text{IPDRB})$$

Keterangan:

TBR = Total Belanja Rata-rata APBD

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Kontruksi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IPDRB = Indeks PDRB Perkapita

α = Bobot Indeks

Kapasitas Fiskal (KpF)

$$\text{KpF} = \text{PAD} + \text{DBH SDA} + \text{DBH Pajak}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH SDA = Sumber Daya Alam

DBH Pajak = PBB, BPHTB, PPh

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 32 hasil dari perhitungan Dana Alokasi Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal dama dengan 0 (nol), menerima Dau sebesar alokasi dasar.
- b) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dana dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar diperhitungkan nilai celah fiskal.

- c) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

2.1.3.6 Penyaluran Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) ini dilakukan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan dan penyaluran DAU dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

2.1.4 Belanja Modal

2.1.4.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk memperoleh tanah, Gedung dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud. Adapun menurut Peraturan Pemerintah no 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan belanja modal adalah anggaran belanja pemerintah daerah untuk memperoleh aset yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok operasional

Belanja modal adalah belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset kekayaan daerah dan selanjutnya

akan menambah belanja yang sifatnya rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan secara matang dalam pemenuhan belanja modal. Tentu belanja modal ini harus sangat disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar aset tetap yang bertambah tidak sia-sia atau malah menambah beban keuangan pemerintah daerah karena peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan. Oleh karena itu pemeliharaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah dalam menjalankan aktifitas pemerintahannya harus dimaksimalkan dengan mendekati pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga harus mampu menggunakan anggaran pendapatan untuk belanja modal yang sesuai dengan proporsinya agar tujuan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercapai.

2.1.4.2 Tujuan Belanja Modal

Tujuan dari belanja modal ini adalah untuk meningkatkan sarana penunjang aktifitas masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian masyarakat ini lahir karena fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat meningkatkan daya tarik investasi dari masyarakat. Sebagai bagian dari belanja daerah, belanja modal memiliki peranan yang penting dalam upaya untuk meningkatkan Pembangunan daerah.

2.1.4.3 Jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran terdapat jenis-jenis belanja modal yaitu:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan seluruh pengeluaran dan pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran yang sehubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai tanah tersebut siap digunakan.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan mesin merupakan pengeluaran atau biaya untuk pengadaan barang peralatan dan mesin yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan seperti biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya yang dapat memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan peralatan dan mesin dapat dipergunakan.

3) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran/biaya untuk memperoleh gedung gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris dan pajak.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontuksi dan biaya-

biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi jalan dan jaringan tersebut siap dipakai. Dalam belanja ini termasuk biaya penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset dan di atas batas minimal kapasitas jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/Pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada Masyarakat. Dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6) Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan Badan Layanan Umum (BLU)

2.1.4.4 Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau aset

tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk kepentingan umum.

2.1.4.5 Perhitungan Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa belanja modal meliputi perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja modal dapat diperhitungkan dengan Rumus:

$$BM = BT + BPM + BGM + BJII + BATL + BAL$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGM = Belanja Gedung dan Bangunan

BJII = Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya

BAL = Belanja Aset Lainnya

2.1.4.6 Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dilengkapi dengan Pengantar Standar

Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu pada kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP di Indonesia sudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan terdiri dari sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
- b. Belanja daerah adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil

- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah sebab akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah atau masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah

- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

- a. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
- b. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan orang lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- c. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan seri terjadi dan berada diluar kendali entitas bersangkutan

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur-unsurnya terdiri dari:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunannya ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

berisikan hal-hal berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan

- f. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.4.7 Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

Laporan posisi keuangan organisasi nilaba meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantupara penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untukmenilai:

- a. kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan
- b. likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhikewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban dan aktiva bersih.

a. Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban

Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut

umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, organisasi biasanya melaporkan masing-masing unsur aktiva dalam kelompok yang homogen, seperti:

- a) kas dan setara kas;
- b) piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain;
- c) persediaan;
- d) sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka;
- e) surat berharga/efek dan investasi jangka panjang;
- f) tanah, gedung, peralatan, serta aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

b. Klasifikasi Aktiva Bersih atau Tidak Terikat

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Aktiva bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aktiva bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum

dalam aktependirian, dan dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas

disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini:

a. Aktivitas pendanaan

1) penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.

2) penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment).

3) bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

2.1.4.8 Perbedaan Laporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintah dengan Standar Akuntansi Keuangan

1. Basis Pelaporan

SAP: Menggunakan basis akrual untuk menyajikan laporan keuangan, yang berarti aset, utang, dan ekuitas diukur berdasarkan nilai sebenarnya pada saat tertentu, serta pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan.

SAK: Menggunakan basis akrual untuk menyajikan laporan keuangan, tetapi juga mengakui aset dan utang berdasarkan harga perolehan (historical cost) dan pendapatan dan beban diakui pada saat kas diterima atau dibayarkan.

2. Penilaian Aset dan Utang:

SAP: Mengakui aset sebesar nilai wajar (fair value) dan liabilitas sebesar nilai wajar, yang dapat menyebabkan selisih penilaian antara SAP dan SAK.

SAK: Mengakui aset sebesar harga perolehan (historical cost) dan liabilitas sebesar nilai wajar, yang dapat menyebabkan selisih penilaian antara SAP dan SAK.

3. Laporan yang Wajib Dibuat

SAP: Wajib menyusun laporan seperti Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

SAK: Wajib menyusun laporan seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Penggunaan Standar:

SAP: Digunakan oleh entitas pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan, termasuk badan layanan umum (BLU) dan organisasi milik pemerintah.

SAK: Digunakan oleh entitas non-pemerintah, seperti yayasan dan perusahaan swasta, untuk menyajikan laporan keuangan.

5. Konsolidasi Laporan:

SAP: Memerlukan mapping dari akun sesuai sistem akuntansi ke akun sesuai SAP untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan.

SAK: Memerlukan mapping dari akun sesuai sistem akuntansi ke akun sesuai SAK untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan.

2.1.5 Kajian Empiris

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan pendukung bagi peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Anggarah Rezka Alifa, Sri Rahayu (2022). Meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020). Hasil Penelitian menyatakan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal
2. Nissa Anggit Pratiwi (2019), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Hasil dari penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal.
3. Miardi Nurzen, Ikhsan Budi Riharjo (2016), meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hasil dari penelitian menyatakan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan dana Alokasi umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

4. Bambang Suprayinto (2015), meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa. Hasil dari penelitian menyatakan secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan tetapi negative terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.
5. Iseu Anggaraeni, Rosan Fitriana dan Iman Rahayu (2022), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Kabupaten Bandung Periode 2011-2019. Hasil dari penelitian menyatakan secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
6. Mei Indriana Dewi, Nur Fadrijh Asyik (2019), meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hasil dari penelitian menyatakan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
7. Erdi Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviani (2015), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan terhadap Belanja Modal

dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kemudian Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dan dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

8. I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya, A.A.N.B Dwirandra (2014) meneliti Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Serta Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli daerah pada Belanja Modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.
9. Maria Selcindya Jemparut, Akhmad Riduwan (2017) meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.
10. Ayu Pratiwi, Siti Nurlaela dan Yuli Chomsatu (2018), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, berpengaruh terhadap Belanja

Modal, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

11. Venny Tria Vanesha, Selamat Rahmadi dan Parmadi (2019). “Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menyatakan secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Secara parsial hanya Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.
12. Fitria Dwi Jayanti (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Aloaksi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Khusu tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.
13. Muhammad Syukri dan Hinaya (2019), meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menyatakan secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, Secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh terhadap Belanja Modal.

14. Fajar Maulana dan Wida Fadhlia (2020), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Luas Wilayah berpengaruh secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
15. Farhan Fahrezi, Nuramalian Hasanah dan I Gusti Ketut Agung Ulupui (2021), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara terpisah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
16. Desak Gede Yudi Atika Sari, Putu Kepramareni dan Ni Luh Gde Novitasari (2017) meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali. Hasil penelitian menyatakan Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh Terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif Terhadap Belanja Modal
17. Rachmawati A. Rifai (2017) meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja

Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi hasil secara simultan terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan dana Bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

18. Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018) meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. Hasil penelitian menyatakan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak Berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.
19. A. Surakhman, Abid Djazuli dan Choiriyah (2019) meneliti Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang. Hasil penelitian menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal baik secara Parsial maupun secara Bersama-sama.

20. Siti Aisyah Nasution, Putri Marinah Valentin, Army Sarumaha, Abigail Manurung dan Munawarah (2023) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Hasil penelitian menyatakan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh Terhadap Belanja Modal.

Selaras dengan hasil dari penelitian terdahulu, berikut ini adalah table persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian oleh penulis:

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Judul, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Anggarah Rezka Alifa, Sri Rahayu (2022). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020)	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Variabel dependen: Belanja Modal Metode penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal	e-Proceeding of Management. Vol.9, No.2 April 2022. ISSN: 2355-9357

			Tahun Penelitian: 2020		
2.	Nissa Pratiwi (2019) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal"	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel Dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota se-Indonesia Tahun Penelitian: 2012-2014	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal	Jurnal Ilmiah MEA.Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2019. e-ISSN: 2621-5306
3.	Miardi Nurzen, Ikhsan Budi Riharjo (2016) "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal"	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel Dependen: Belanja Modal	Alat Analisis: Analisa Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Penelitian: 2012-2014	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 5 No.4 April 2016. ISSN: 2460-05852
4.	Bambang Suprayinto (2015) "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa"	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Variabel dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Alat analisis: analisa Regresi Linier Berganda" Subjek Penelitian: Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa Tahun Penelitian: 2009-2013	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Modal	Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP. Vol.2 No.1, Juni 2015 ISSN 2339-1545

				Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum berpengaruh terhadap Belanja Modal	
5.	Iseu Anggraeni, Rosa Fitriana, Iman Rahayu (2022) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Kabupaten Bandung Periode 2011-2019	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Variabel Dependen: Belanja Modal	Alat analisis: analisi Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten Bandung Tahun Penelitian: 2011- 2019	Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal	Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 13, No.3 September- Desember 2022. E- ISSN: 2086- 4159
6.	Mei Indriana Dewi, Nur Fadjrih Asyik (2019), “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal”	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisi Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Penelitian: 2015- 2017	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Dana Alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 8, No. 9 September 2019. e-ISSN: 2460-0585
7.	Erdi Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviani (2015), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel dependen: Belanja Modal	Alat Analisis: Analisis Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Penelitian: 2011- 2013	Pendapatan Asli tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal	Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Vol.4 No.2 Nopember 2015 ISSN: 1979-4878

				Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dan dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal	
8.	I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya, A.A.N.B Dwirandra (2014). "Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi"	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Variabel dependen: Belanja Modal	Alat analisis: Analisi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota di Bali Tahun Penelitian: 2006- 2011	Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli daerah pada Belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayanana Vol.7 No.1 2014 ISSN: 2302-8556
9.	Maria Selcindya Jemparut, Akhmad Riduwan (2017). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal".	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel dependen: Belanja Modal	Alat analisis: Analisi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun Penelitian: 2013- 2015	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.6 no.9 September 2017. e-ISSN: 1460-0585
10.	Ayu Pratiwi, Siti Nurlaela dan Yuli Chomsatu (2018) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah.	Variabel Independen: Belanja Pegawai Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, berpengaruh terhadap Belanja Modal	Jurnal Ekonomi Paradigma Vol.19 No.2 Aguatus 2017-Januari 2018. ISSN: 1693-0827

	terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta”	Variabel dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Subjek Penelitian: Pemerintah Kota Surakarta Tahun Penelitian: 2008-2014	Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal	
11.	Venny Tria Vanesha, Selamat Rahmadi dan Parmadi (2019). “Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel dependen: Belanja Modal Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun penelitian: 2011-2017	secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Secara parsial hanya Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal	Jurnal Paradigma Ekonomi Vol.14 No.1 Januari – Juni 2019 ISSN: 2085-1960
12.	Fitria Dwi Jayanti (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel dependen: Belanja Modal Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Penelitian: 2016-2018	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal	Jurnal EMBA Vol.8 No.3 Juli 2020 ISSN: 2303-1174
13.	Muhammad Syukri dan Hinaya (2019) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan”	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus Alat Analisis: Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Penelitian:	Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal Secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh	JEMMA Vol.2 No.2 September 2019. e-ISSN: 2615-5850

			2016-2018	terhadap Belanja Modal	
14.	Fajar Maulana dan Wida Fadhlia (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Variabel dependen: Belanja Modal Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus dan Luas Wilayah Alat Analisis: Regresi Linier Berganda Tahun Penelitian: 2014-2018	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Luas Wilayah berpengaruh secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal. pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.5 No.3 2020. e-ISSN 2581-1002
15.	Farhan Fahrezi, Nuramalian Hasanah dan I Gusti Ketut Agung Ulupui (2021) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel dependen: Belanja Modal Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Metode penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Alat Analisis: Regresi Linier Berganda Tahun Penelitian: 2015-2019	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara terpisah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal	Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing Vol.2 No.1 April 2021 ISSN: 2722-9823

16.	Desak Gede Yudi Atika Sari, Putu Kepramareni dan Ni Luh Gde Novitasari “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Variabel dependen: Belanja Modal Metode penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Sisa Lebih Pembiayaan Anggran dan Dana Perimbangan Alat Analisis: Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali	Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh Terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif Terhadap Belanja Modal	Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Vol.9 No.1 Juli 2017 ISSN: 2301-8879
17.	Rachmawati A.Rifai (2017) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi hasil Alat Analisis: Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Penelitian: 2010-2014	Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi hasil secara simultan terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan dana Bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.	e jurnal Katalog Vol. 5 No.7 Juli 2017 ISSN: 2302-2019
18.	Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018) “Pengaruh	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh	Akuntansi Dewantara Vol.2 No.2

	Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016”	Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel dependen: Belanja Modal	Dana Alokasi Khusus Alat Analisis: Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Penelitian: 2011-2016	positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Dana Alokasi Umum tidak Berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	Oktober 2018. e-ISSN: 2549-9637
19.	A. Surakhman, Abid Djazuli dan Choiriyah (2019) “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus Alat Analisis: Regresi Berganda Subjek Penelitian: Pemerintah Kota Palembang Tahun Penelitian: 2008-2017	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal baik	Kolegial Vol.7 No.2 Desember 2019. e-ISSN 2614-008X

				secara Parsial mauapaun secara Bersama-sama.	
20.	Siti Aisyah Nasution, Putri Marinah Valentin, Army Sarumaha, Abigail Manurung dan Munawarah (2023) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara”	Variabel independen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel Dependen: Dana Alokasi Khusus Metode Analisis: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus Analisis Penelitian: Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Penelitian: 2018- 2021	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh Terhadap Belanja Modal	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Vol.7 No.3 Juli 2023. e- ISSN: 2548- 9224
Hifa Nurafwa (2024) 203403145					
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022					

2.2 Kerangka pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *grand theory* keagenan yang melibatkan hubungan kerja antara dua pihak, yaitu principal (pemerintah pusat) dan agen (pemerintah daerah), dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976:5).

Kaitan teori Keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur secara mandiri segala kegiatan yang ada pada pemerintah daerahnya. Oleh karena itu, konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan sehari-hari daerahnya maupun

memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu juga keagenan ini berhubungan dengan pemerintah daerah dengan masyarakat, masyarakat sebagai principal telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah selaku agen dalam hal ini sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:107) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran operasional pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat (pujoalwanto 2014:87). Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Adanya otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat Pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi mencapai kesejahteraan antar daerah dan meningkatkan pelayanan publik (Jaya,2014). Oleh karena itu, Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi di suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). Jika PDRB suatu daerah meningkat maka pemerintah seharusnya memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan aset berupa fasilitas pelayanan publik, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Pengadaan aset tersebut didapatkan dari belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya.

Dengan demikian, adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal yaitu jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka belanja modal juga meningkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka belanja modal akan semakin meningkat begitu pula jika semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka belanja modal semakin rendah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah merupakan tolak ukur kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah, semakin

tinggi proporsinya artinya tangka ketergantungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat semakin berkurang.

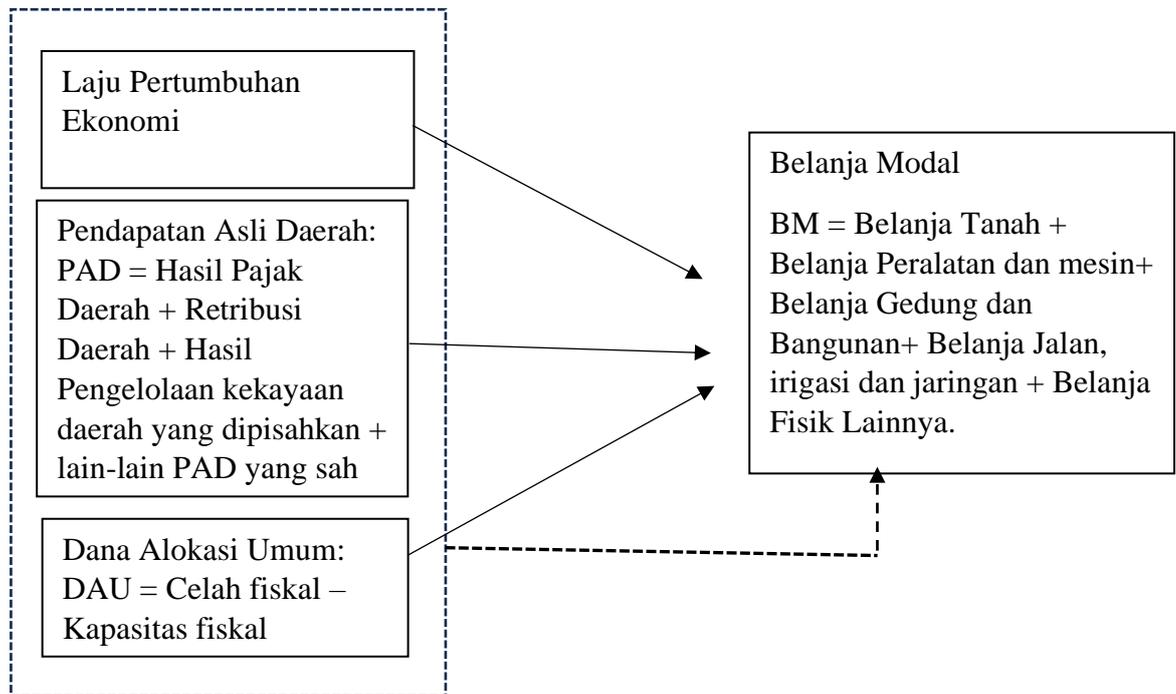
Pendapatan asli daerah berperan dalam mendai pelaksanaan otonomi daerah guna unntuk mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian suatu daerah (Mardiasmo, 2002:42). Oleh karena pemerintah daerah melajjukan berbagai upaya dalam peningkatan pelayanan publik, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal. peningkatan dalam pembangunan dan kualitas pelayanan terhadap Masyarakat serta Tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang. Jika aset tetap yang dimiliki daerah semakin meningkat maka dapat digunakan sebagai investasi untuk sumber alokasi belanja modal dan juga dapat membuktikan bahwa pemerintah telah berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah (Rustyaningsih, 2021). Dengan meningkatkan PAD diharapkan belanja modal pun semakin meningkat

Dari teori yang dijelaskan diduga bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja Modal. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Mei Indriana Dewi, Nur Fadjrih Asyik (2019) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka akan meningkatkan alokasi Belanja Modal, oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber-sumber pendapatan.

Selain Pendapatan Asli Daerah, sumber penerimaan daerah lainnya adalah Dana alokasi umum, DAU dapat menunjukkan Tingkat kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 21 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin besar dana alokasi umum diterima berarti daerah tersebut masih sangat tinggi ketergantungan pada pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya. Bahwasannya semakin tinggi dana alokasi umum sangat berhubungan dengan belanja modal suatu daerah yang mampu meningkatkan kemandirian suatu daerah tersebut.

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan dengan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi. Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 dengan adanya tranfer DAU dari pemerintah pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan A. Surakhman, Abid Djazuli dan Choiriyah (2019) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

- : Secara Parsial
 - - - - - → : Secara Simultan

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Karena sifatnya masih sementara maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.
2. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.